



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, diperlukan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
13. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 2

- (1) IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU PD harus sesuai dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.

- (3) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).
- (4) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan/atau Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB III PENGUNAAN IKU

Pasal 4

IKU digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan PD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan IKU.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. PD yang melaksanakan fungsi perencanaan;
 - c. PD yang melaksanakan fungsi pengawasan;
 - d. PD yang melaksanakan fungsi keuangan; dan
 - e. PD yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
- (3) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (4) Monitoring atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
- (5) Evaluasi atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

Visi

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang periode Tahun 2019-2024 yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG
YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH”
(SEDAYA AMANAH)

Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
1	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia		
1.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan, indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, mencakup: Umur Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Riil per kapita, dan Laju Pertumbuhan Penduduk. Formulasi Pengukuran: Rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e ₀), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. Satuan: Angka (1-100) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
1.2	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Inflasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi merupakan salah satu indikator yang untuk mengukur kesehatan keadaan perekonomian suatu daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Persentase kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dapat menunjukkan standar masyarakat untuk dapat hidup dengan layak, sehingga penting untuk menentukan program-program intervensi untuk pengentasan kemiskinan. Biasa disebut juga sebagai paritas daya beli.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.</p> <p>Satuan: Ribu Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		Angka Kemiskinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>SKPD Penanggung Jawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
1.3	Meningkatnya pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Pembangunan Gender merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Pembangunan Gender diukur berdasarkan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang memperhatikan ketimpangan gender.</p> <p>Satuan: Angka (1 – 100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
2	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelesarian lingkungan hidup		
2.1	Meningkatnya daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di satu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan <i>output</i> wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan di ketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		PDRB Perkapita	<p>Alasan Pemilihan Indikator: PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk.</p> <p>Satuan: Juta Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
		Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Infrastruktur dasar yang dimaksud adalah infrastruktur transportasi, jalan, irigasi, dan sarana-prasarana perhubungan.</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan dengan mengimplementasikan 2 (dua) buah konsep, yaitu konsep pengembangan wilayah dan konsep berkelanjutan. Konsep pengembangan wilayah dilakukan dengan mengintegrasikan RTRW Kabupaten Magelang ke dalam pembangunan infrastruktur baik pada kawasan strategis, kawasan potensial, kawasan perbatasan, maupun kawasan rawan bencana. Sedangkan konsep keberlanjutan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan lahan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase ketercapaian IKLH + Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah)/2</p> <p>Keterangan: Persentase ketercapaian IKLH diperoleh dengan formula: (Nilai IKLH/Nilai Maksimal IKLH) x100%</p> <p>Nilai IKLH dihitung dengan formula: (IKAx30%)+(IKUx30%)+(IKTLx40%)</p> <p>Detail cara perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Bappeda dan Litbangda dan Badan Pusat Statistik</p>
3	Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah		
3.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi meliputi: manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumberdaya manusia, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>

NO	MISI DAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: Angka (1-100) dan Huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggungjawab: Sekretariat Daerah</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

- URUSAN : Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- FUNGSI : 1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
5. Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
8. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi: perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: Angka (1-100) dan Huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{(((\text{Jumlah kebijakan yang tidak bermasalah} / \text{jumlah kebijakan yang ada (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan Bersama)} + ((\text{Jumlah kebijakan yang ada} / \text{jumlah kebijakan yang seharusnya ada})) \times 100\%))}{2}$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kesekretariatan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Rumus: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang) Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Sekretariat Daerah

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- URUSAN : Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah;
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas kesekretariatan DPRD; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal, yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: Angka (1-100) dan Huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan fasilitasi layanan Lembaga DPRD merupakan kunci optimalnya penyusunan produk-produk hukum daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((jumlah faslitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi raperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus dispakati)x100%)+(jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati/jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan)x100%))/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat DPRD</p>

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

- URUSAN : Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengawasan;
 3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
 8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengawasan;
 9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal, yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (1-100) dan Huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah dan Kemenpan RB</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Level Kapabilitas APIP digunakan mengetahui tingkat kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Laporan Hasil Pengawasan ((Jumlah LHP + LHP Kasus + LHR + LHE + Laporan monitoring)/ (Jumlah Pemeriksaan + Kasus + Review + Evaluasi + Monitoring)) x 100% b. Persentase Tindak Lanjut yang terselesaikan ((Jumlah Tindak Lanjut yang terselesaikan)/(Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Pengawasan)) x 100% c. Persentase nilai aksi pencegahan korupsi Persentase nilai aksi korupsi diperoleh melalui penilaian terhadap 8 (delapan) area indikator intervensi terhadap rencana aksi Korsupgah malalui Aplikasi Monitoring Certer for Preventif (MCP). <p>Penghitungan Kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Inspektorat dan BPKP</p>
1.2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SPIP Maturitas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui sejauhmana Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dilaksanakan /diterapkan di SKPD</p> <p>Formulasi Pengukuran: Penghitungan Nilai Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>TipePerhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Inspektorat dan BPKP</p>
1.2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui sejauhmana Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dilaksanakan /diterapkan di SKPD</p> <p>FormulasiPengukuran: Penghitungan Nilai Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP</p> <p>TipePerhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Inspektorat dan BPKP</p>

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- URUSAN : Pendidikan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Dan Kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
 3. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
 4. Pelaksanaan Administrasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
 5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 6. Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Daerah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan;
 8. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Kebudayaan; Dan
 9. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat untuk menyelesaikan jenjang tahun pendidikan, sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Sumber Data: Disdikbud</p>
		Harapan Lama Sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam menyediakan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
		Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Magelang dalam menyediakan mutu layanan pendidikan SD dan SMP</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) * 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) * 100\%) / 2$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan mulai jenjang PAUD, SD/MI, Paket A dan SMP/MTs/Paket B</p> <p>Formulasi Pengukuran: $(\text{APK PAUD} + \text{APK SD/MI/Paket A} + \text{APK SMP/MTs/Paket B}) / 3$</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Angka Partisipasi Murni (APM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan untuk jenjang SD/MI, Paket A dan SMP/MTs/Paket B</p> <p>Formulasi Pengukuran: (APM SD/MI/Paket A + APM SMP/MTs/Paket B)/2</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan untuk jenjang SD/MI, Paket A dan SMP/MTs/Paket B</p> <p>Formulasi Pengukuran: (APS PAUD + APS SD/MI/Paket A + APS SMP/MTs/Paket B) / 3</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
Sasaran:			
1.2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Rerata Nilai UN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui hasil ujian untuk mengukur mutu pendidikan untuk SD dan SMP</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Rerata Nilai UN SD + Rerata Nilai UN SMP) / 2</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>
		Angka Kelulusan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui hasil ujian untuk mengukur mutu pendidikan untuk SD dan SMP</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Angka Kelulusan SD + Angka Kelulusan SMP) / 2</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.3	Meningkatkannya Pengelolaan (Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan) Kebudayaan	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan Kabupaten Magelang dalam upaya perlindungan terhadap Benda Situs dan Kawasan cagar budaya, serta karya budaya yang terlayani dan kelompok seni budaya yang aktif.</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Persentase Benda Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan)+ (Persentase Karya Budaya yang Terlayani)+(Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif))/3</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disdikbud</p>

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

- URUSAN : Kesehatan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas kesehatan;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka Harapan Hidup	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perkiraan rata-rata lamanya hidup yang dijalani seseorang. Semakin lama umur hidup yang dijalani merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk (BPS)</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kualitas pelayanan kesehatan salah satu penentu kinerja pembangunan Kesehatan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang terakreditasi)/(Jumlah FKTP/FKTL/Lab yang ada)* 100 persen.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
1.2	Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit	Angka kesakitan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka kesakitan menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Angka kesakitan juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah penderita baru yang ditemukan pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun n.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
Sasaran:			
1.3	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kematian ibu merupakan salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun</p> <p>Satuan: Angka Per 1000 Kelahiran Hidup</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Angka Kematian Bayi (AKB);	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH</p> <p>Satuan: Per 1000 Kelahiran Hidup</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Angka Kematian Balita (AKABa);	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka kematian balita merupakan salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kematian balita merupakan kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH</p> <p>Satuan: Per 1000 Kelahiran Hidup</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka kematian balita merupakan salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kematian yang terjadi pada bayi usia sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH</p> <p>Satuan: Per 1000 Kelahiran Hidup</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
		Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai alat ukur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Puskesmas/RS yang berkualitas)/(jumlah Puskesmas/RS yang ada)x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- URUSAN : Pekerjaan Umum
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang, pertanahan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu wilayah</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan)/2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan + Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik + cakupan layanan jaringan irigasi + Cakupan layanan Sumber Daya Air + Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik + Cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase terbangunnya landmark + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi + Cakupan sarana prasarana ke PU-an + cakupan layanan Jasa konstruksi + Persentase dokumen rekomendasi perijinan + Persentase kesesuaian tata ruang + Cakupan kinerja pertanahan)/14.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

URUSAN : Perumahan dan Kawasam Pemukiman

TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	Cakupan hunian layak dan berkualitas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Agar optimal penyediaan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase ketersediaan rumah layak huni + Persentase kawasan permukiman berkualitas)/2</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPRKP</p>
Sasaran:			
1.1	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Persentase ketersediaan rumah layak huni	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Agar optimal pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase peningkatan rumah layak huni + Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR + Persentase penyediaan dan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>rehabilitasi rumah korban bencana + Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi warga terdampak proyek pemerintah + Persentase Penanganan PSU Perumahan)/5 x 100%</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPRKP</p>
		<p>Persentase kawasan permukiman berkualitas</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Diperlukan perbandingan antara kawasan permukiman ditangani dan luas kawasan permukiman di Kabupaten Magelang untuk dapat mengukur progres penanganan yang sudah dilakukan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (persentase penanganan kawasan permukiman kumuh + persentase pengendalian kawasan permukiman + persentase penyediaan TPU + persentase penanganan PSU Permukiman)/4 x 100</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DPRKP</p>

8. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
 8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengamanan; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Adanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat menjamin semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Semakin tingginya indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kunci meningkatnya daya saing ekonomi daerah</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan penegakan hukum + Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana + Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3</p> <p>Satuan: Skala 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 2. BPBD 3. Kantor Kesbangpol</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Penegakan Hukum	Cakupan Penegakan Hukum	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan penegakan hukum merupakan data dan informasi tentang penanganan yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((jumlah penindakan/jumlah pelanggaran x 100%) + ((jumlah penertiban/(jumlah target perencanaan penertiban + jumlah aduan) x 100%) + (jumlah satlinmas yang aktif/jumlah satlinmas kabupaten x 100%) + ((jumlah pengamanan/target pengamanan x 100%) + (jumlah pengawalan/jumlah permintaan pengawalan x 100%)/2) + (Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap/jumlah kebakaran x 100%))/4</p> <p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Perangkat Daerah Penanggung Jawab: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran</p>

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

- URUSAN : 1. Kesehatan
2. Sosial
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan social, rehabilitasi, perlindungan, jaminan social, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang fakir miskin, pemberdayaan social, rehabilitasi, perlindungan, jaminan social, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan social, rehabilitasi, rehabilitasi, perlindungan, jaminan social, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan social, ehabilitasi, perlindungan, jaminan social, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
8. Pelaksanaan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan social, rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin, pemberdayaan social, rehabilitasi, perlindungan, jaminan social, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Penurunan PMKS merupakan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan dan menjadi salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah PMKS tahun n - 1) - jumlah PMKS tahun n) / Jumlah PMKS Data Tahun berjalan *100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Cakupan penanganan PMKS	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial menjadi salah satu tolok ukur penanggulangan kemiskinan</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase PMKS yang tertangani + Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS)/2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
Tujuan:			
2	Meningkatnya keberdayaan Gender	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih adanya kesenjangan gender pada pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi</p> <p>Formulasi Pengukuran: $1/3 (Ipar+IDM+Linc-dist)$ (Ipar = Indek keterwakilan perempuan di Parelemen; IDM = Indek pengambilan keputusan; Linc-dist = Indek distribusi pendapatan)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
		Katagori Kabupaten Layak Anak	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih adanya kesenjangan gender pada pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Peringkat Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
Sasaran:			
2.1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan pemberdayaan perempuan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase perempuan di lembaga legislatif + Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi + Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) + Rasio Kekerasan terhadap perempuan + Rasio kekerasan terhadap anak)/5</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
		Rasio Kekerasan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah kasus ditangani/Jumlah Rumah Tangga x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>
Tujuan:			
3	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka Harapan Hidup	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Nilai Angka Harapan Hidup dinilai berdasarkan Angka Perkiraan lama Hidup rata-rata Penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur (BPS).</p> <p>Satuan: Angka 0-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
Sasaran:			
3.1	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Grafik pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang sudah mendekati pada bonus demografi</p> <p>Formulasi Pengukuran: Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>
		Persentase keluarga Pra Sejahtera	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan salah satu kriteria variable pendataan penduduk miskin</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Keluarga Pra sejahtera/Jumlah keluarga)*100%</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: DINSOS PPKB PPPA</p>

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- URUSAN : Industri dan Urusan Tenaga Kerja
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, produktivitas kerja, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja; dan;
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	PDRB sektor industri pengolahan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Output ekonomi daerah tercermin dari nilai PDRB. Sektor Industri Pengolahan merupakan salah satu penyumbang PDRB Kabupaten Magelang yang terkait langsung dengan dunia perindustrian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Perkembangan industri tampak dari pertumbuhan jumlah industri dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (jumlah industri tahun n - jumlah industri tahun n-1) / (jumlah industri sd tahun n) dikali 100%)</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disperinnaker</p>
Tujuan:			
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur besarnya pengangguran yang ada. TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Persentase pengangguran terhadap angkatan kerja yang ada.</p> <p>Satuan: persentase</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik</p>
Sasaran:			
2.1	Sasaran Strategis I Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Indeks Produktivitas Tenaga Kerja	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Produktivitas Tenaga Kerja akan mendorong output bagi dunia usaha dan perekonomian daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB/Total Angkatan Kerja Yang Bekerja).</p> <p>Satuan: indek</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Disperinnaker</p>

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- URUSAN : Lingkungan Hidup
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
4. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan ukuran kuantitatif dengan formula dan metode pasti tentang gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH digunakan secara nasional. Dengan mengetahui nilai IKLH, dapat diketahui media lingkungan yang masih kurang baik sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>sehingga akan lebih efektif dan efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor S.269/P3Ejw/10/2015, diupayakan mensinergikan sasaran strategis KLHK dalam RPMN dan RPJMD dengan cara menargetkan peningkatan IKLH menjadi sasaran strategis dalam RPJMD. <p>Formulasi Pengukuran: Nilai IKLH berdasarkan hasil evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>
Sasaran:			
1.1	Sasaran strategis: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan, program pemingkatan usaha dijadikan sebagai acuan usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Indikator tersebut sebagai acuan kinerja pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Usaha dan kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru)/(jumlah usaha dan kegiatan wajin diawasi)) x 100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Persentase pengelolaan sampah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Amanat Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah yang benar adalah kunci keberhasilan pengendalian pencemaran.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Persentase penanganan sampah ditambah persentase pengurangan sampah sesuai dengan Perbup No. 39 Tahun 2018.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Berdasarkan indikator pembangunan berkelanjutan dan Pemendagri No. 86 Tahun 2017.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100\%$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai indikator kinerja pelaksanaan konservasi di daerah kritis, rawan bencana, resapan air dan keanekaragaman hayati. Indikator tersebut juga sebagai indikator kinerja adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase konservasi daerah resapan air + Persentase konservasi daerah rawan longsor + Persentase mata air dikonservasi + Persentase Desa Proklamasi + Persentase Capaian Pembinaan Sekolah Adiwiyata)/5</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup</p>

12. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- URUSAN : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data;
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan alat ukur yang komprehensif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terkait pelayanan publik yang diterima dan dirasakan masyarakat. IKM diharapkan dapat menjadi pemacu bagi instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan melalui inovasi – inovasi pelayanan publik

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Satuan: Nilai interval IKM: 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bagian Organisasi</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan Sipil	Rasio Perekaman KTP Elektronik dan Keluarga Yang Ber KK	<p>Alasan Pemilihan Indikator Kepemilikan KTP elektronik dan Kartu Keluarga merupakan bagian dari pelaksanaan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), pada aspek: pelaksanaan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dan pentingnya pemutakhiran data kependudukan. Data KTP dan Kartu Keluarga digunakan sebagai sumber data penentuan kebijakan pembangunan.</p> <p>Formulasi Pengukuran (Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP+Persentase penerbitan KK)/2</p> <p>Satuan Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan Komulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	<p>Alasan Pemilihan Indikator Rasio ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Disdukcapil untuk melaksanakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), pada pelaksanaan aspek: kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.</p> <p>Formulasi Pengukuran (Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>
		Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	<p>Alasan Pemilihan Indikator Pemanfaatan Data juga merupakan wujud dari upaya Disdukcapil dalam melaksanakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) pada pelaksanaan aspek: Pemutakhiran Data.</p> <p>Formulasi Pengukuran (Persentase Pengelolaan Informasi+Persentase Pemanfaatan Data)/2</p> <p>Satuan Angka 1-100</p> <p>Tipe Perhitungan Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>

13. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN : Pemerintahan

TUGAS : Tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa serta kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan :			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Indeks Desa Membangun (IDM)	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Desa Membangun (IDM) dijadikan rujukan untuk mengentaskan desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia, IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya partisipasi masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>pemberdayaan desa. Adapun Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa <p>Dengan menggunakan Parameter Indeks Desa Membangun (IDM), maka dapat diketahui progres status kemajuan dan kemandirian masing-masing desa, namun demikian rata-rata IDM se Kabupaten Magelang tidak otomatis bisa diinterpretasikan bahwa itu adalah merupakan rata-rata status desa se Kabupaten Magelang, tetapi harus dicermati status masing-masing desa untuk dapat menyajikan data IDM secara akurat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa $IDM = 1/3(IKS + IKE + IKL)$ Pengukuran Berdasarkan Permendes PDPT nomor: 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.</p> <p>Satuan: Angka (0-1)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dispermasdes dan Kemendes PDPT</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah tercapainya Desa Mandiri, dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pemerintahan desa, pengembangan kawasan pedesaan dan peningkatan swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa. Dengan semakin meningkatnya jumlah desa berkembang, maju dan Mandiri maka IDM (Indeks Desa Membangun) yang merupakan rujukan pengentasan desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri akan semakin meningkat.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang/Jumlah Seluruh Desa) x 100 % Pengukuran Berdasarkan Permendes PDDT nomor: 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.</p> <p>Satuan: Angka (0-1)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dispermasdes dan Kemendes PDDT</p>

14. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

- URUSAN : Perhubungan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, perparkiran, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
4. Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perhubungan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Cakupan pembangunan Infrastruktur Wilayah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Sebagai tolok ukur kemajuan wilayah</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas + Persentase angkutan umum layak jalan)/4</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan Komulatif</p> <p>Sumber Data Dinas Perhubungan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Perhubungan	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana jalan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Pembangunan Prasarana jalan mempunyai arti yang sangat penting untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan di jalan raya</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah ketersediaan prasarana angkutan jalan (halte, terminal, parkir)/Jumlah kebutuhan ketersediaan prasarana angkutan jalan (halte, terminal, parkir))x100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>
		Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengaman dan keselamatan lalu lintas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Fasilitas perlengkapan jalan yang memadai dapat mendukung terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah ketersediaan fasilitas Perlengkapan jalan (APILL,rambu, Marka,PJU,ITS)/ Jumlah kebutuhan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (APILL,rambu,Marka,PJU,ITS))x100%</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>
		Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan lalu lintas	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Melalui Bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas diharapkan masyarakat lebih paham dan mengerti dengan etika berlalu lintas</p> <p>Formulasi Pengukuran: Cakupan jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Pelayanan angkutan umum yang layak akan tercipta kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan umum.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Cakupan Kendaraan Bermotor yang di uji/ Cakupan Kendaraan Bermotor wajib uji</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perhubungan</p>

15. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- URUSAN : 1. Komunikasi dan Informatika
2. Persandian
3. Statistik
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	<p>Formulasi Pengukuran: Formulasi pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE yang dituangkan ke dalam tabel-tabel parameter yang sudah disusun oleh kementerian PAN-RB.</p> <p>Satuan: Angka 0-5</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan RB</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya pelaksanaan e-government	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Kecepatan Koneksi Intranet dan Internet Untuk Pelayanan diseluruh Perangkat Daerah yang sesuai standar Keamanan Informasi.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		keamanan informasi	<p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil+Cakupan Layanan Komunikasi+Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk Pelaksanaan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA+Persentase ketersediaan perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK+Persentase layanan domain dan subdomain bagi Desa dan PD)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria+Persentase diseminasi informasi melalui media massa+Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat+Cakupan diseminasi melalui media interpersonal+Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang+Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah))/6</p> <p>Satuan: Persen</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>
		<p>Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Mempercepat dan memudahkan masyarakat menerima isi informasi sebagai ukuran penyebarluasan informasi kepada masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan+Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar)/2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Diskominfo</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Sumber Data: DPMPTSP
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Investasi	Jumlah nilai investasi PMDA	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah nilai investasi PMA merupakan tolok ukur meningkat atau tidaknya Realisasi Investsasi di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah investasi yang masuk dari Luar Negeri (PMA)</p> <p>Satuan: Miliar</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP</p>
		Jumlah nilai investsi PMA	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Jumlah nilai investasi PMDN merupakan tolok ukur meningkat atau tidaknya Realisasi Investsasi di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah investasi yang masuk dari Dalam Negeri (PMDN)</p> <p>Satuan: Miliar</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP</p>
1.2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Survey Kepuasan Pelayanan Perizinan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Survey kepuasan pelayanan perizinan merupakan tolok ukur meningkat atau tidaknya pelayanan perizinan di Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: Survey/kuesioner pengguna layanan perizinan</p> <p>Satuan: angka</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: DPMPTSP</p>

17. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- URUSAN : 1. Perpustakaan
2. Kearsipan
- TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan , kearsipan, dan kesekretariatan.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas perpustakaan dan bidang kearsipan.
6. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Kinerja pembangunan pendidikan	Indek Pengetahuan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kegemaran membaca dapat meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang akan berdampak pada meningkatnya partisipasi sekolah. Dengan meningkatnya partisipasi sekolah tersebut Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah diharapkan juga meningkat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Harapan Lama Sekolah + Rata-rata lama sekolah)/2</p> <p>Satuan: Angka: 1 – 100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Rasio pengunjung Perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator Rasio Pengunjung menunjukkan seberapa besar pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah pengunjung perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten/jumlah penduduk</p> <p>Satuan: Angka 0 - 1</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perpustakaan</p>
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Dengan pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang baik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Satuan: Angka: 0 – 100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang</p>
Sasaran:			
1.3	Meningkatnya pelayanan Kearsipan	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan Arsip secara baku	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan Arsip secara baku dapat memberikan gambaran terukur atas capaian sasaran strategis</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencipta arsip yang mengolah arsip secara tertib/Jumlah pencipta arsip) x 100%</p> <p>Satuan: Angka: 1 – 100</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>

18. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- URUSAN : 1. Pertanian
2. Perikanan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	Alasan Pemilihan Indikator: PDRB (menurut Pendekatan Produksi) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). (BPS/Badan Pusat Statistik) PDRB per-kapita adalah ukuran produktivitas tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap individu di wilayahnya untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalan 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n</p> <p>Pendekatan Produksi dapat disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipain oleh unit produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikutsertanya dalam proses produksi.</p> <p>Satuan: Rupiah</p> <p>Tipe Penghitungan: komulatif</p> <p>Sumber Data: BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Pertanian dan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
Sasaran:			
1.1	Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai jual daging menyumbang cukup besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi daging dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		Produksi Telur	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai jual telur menyumbang cukup besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi telur dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Produksi susu	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai jual susu menyumbang cukup besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi susu dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Liter</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai jual produk perikanan budidaya (benih ikan) menyumbang cukup besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi ikan (benih) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Kali 1.000 ekor</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Jumlah produksi ikan (konsumsi)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai jual produk ikan (konsumsi) menyumbang cukup besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Tipe Penghitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>
		Produksi perikanan tangkap	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai jual produk perikanan tangkap menyumbang cukup besar terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi perikanan tangkap dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Penghitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan</p>

19. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- URUSAN : Kepemudaan dan Olahraga
- TUGAS : Melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumah tanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- FUNGSI : 1. Pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
2. Pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
3. Perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
5. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
8. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
9. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
10. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
11. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
13. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
14. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;

15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
16. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
17. Pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
		Rata-rata lama sekolah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.</p> <p>Satuan: Tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Cakupan prestasi generasi muda	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Cakupan prestasi generasi muda untuk mengevaluasi capaian sasaran pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang khususnya dalam peningkatan prestasi generasi muda dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Magelang.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi pengukuran: (((jumlah pemuda berprestasi / jumlah pemuda peserta lomba)*100) + ((jumlah atlet berprestasi / jumlah atlet yang ikut kejuaraan)*100)) / 2</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>
Tujuan:			
2	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	<p>Alasan Pemilihan Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai tolok ukur aktivitas perekonomian yang berasal dari sektor pariwisata 2. Sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan SKPD mampu mendorong perekonomian domestik 3. Pariwisata menjadi sektor unggulan setelah pertanian. <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB Sektor pariwisata tahun n</p> <p>Satuan: Miliar Rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>
Sasaran:			
2.1	Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian sasaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan secara terukur dan akurat</p> <p>Formulasi pengukuran: ((jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n - jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n - 1 / jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n - 1)x100)x0.35 + ((jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n - jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n - 1/jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke n - 1)x100)x0.65</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
		<p>Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan</p>	<p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <hr/> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pariwisata di Kabupaten Magelang sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya PDRB yang dihasilkan dari <i>multiplier effect</i> yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Magelang.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\left(\frac{\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1}{\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1} \right) \times 100 \times 0.35 + \left(\frac{\text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - 1}{\text{lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1} \right) \times 100 \times 0.65$ </p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>

20. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- URUSAN : 1. Pertanian
2. Pangan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas pertanian dan pangan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menggambarkan kemampuan daya saing ekonomi daerah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun n</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: miliar rupiah</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Ketersediaan pangan utama dapat menggambarkan pemenuhan peningkatan ketahanan pangan daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Keterediaan pangan utama = (rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama/jumlah penduduk) x 100%.</p> <p>Satuan: Kg/jiwa/tahun</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
1.2	Peningkatan ketahanan pangan	Stabilitas harga pangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Stabilitas harga dapat menggambarkan pemenuhan peningkatan ketahanan pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: inflasi harga bahan pangan pokok (BPS)</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan indikator pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Persen Angka Kecukupan Gizi (A) x bobot masing-masing kelompok pangan.</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.3	Pengembangan produksi pertanian berdayasaing dan berwawasan lingkungan	Produksi padi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan produksi pertanian/ perkebunan menuju swasembada pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah produksi padi (ton) dalam 1 tahun</i></p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi jagung	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan produksi pertanian/ perkebunan menuju swasembada pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi jagung (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi cabai	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Menekan laju inflasi dengan ketersediaan bahan pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah produksi cabai (ton) dalam 1 tahun</i></p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>SKPD Penanggung jawab: Distan dan Pangan</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi bawang putih	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Menekan laju inflasi dengan ketersediaan bahan pangan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi bawang putih (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi kelengkeng	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas pertanian lokal.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi kelengkeng (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi jeruk	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas pertanian lokal.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi jeruk (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi salak	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas pertanian lokal.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Jumlah produksi salak (ton) dalam 1 tahun</i></p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi kopi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai komoditas memiliki nilai jual yang bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi kopi (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Sumber Data: Distan dan Pangan</p>
		Produksi cengkeh	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai komoditas memiliki nilai jual yang bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi cengkeh (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPS dan Distan dan Pangan</p>
		Produksi kelapa	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai komoditas memiliki nilai jual yang bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi kelapa (ton) dalam 1 tahun</p> <p>Satuan: Ton</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPS dan Distan dan Pangan</p>
		Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan daya saing produksi pertanian/ perkebunan melalui pengembangan pertanian organik.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $(\text{produksi produk unggulan terstandarisasi} / \text{total produksi produk unggulan}) \times 100\%$</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPS dan Distan dan Pangan</p>

21. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN : Perdagangan

TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan kesekretariatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 4. Pelaksanaan administrasi bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
 7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Daerah	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Peran Sektor Perdagangan memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai PDRB Sector perdagangan tahun n</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BPS</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam PDRB	Cakupan Pelayanan Perdagangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kualitas Pelayanan Perdagangan merupakan ukuran keberhasilan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

22. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan konsep kebijakan bidang informasi dan pengadaan pegawai, sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai,
3. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
6. Pelaksanaan administrasi bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
8. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai;
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan pengadaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan karier, kesejahteraan dan pembinaan pegawai; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	Indeks Merit Sistem	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Sistem Merit merupakan ukuran sejauhmana kepatuhan instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit sebagai wujud implementasi pelaksanaan Undang

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Formulasi Pengukuran: <i>Indeks Merit Sistem</i> $= \sum \frac{(\text{Skor} \times \text{Bobot dalam setiap aspek})}{(\text{Skor maksimal} \times \text{bobot maksimal})}$</p> <p>Dasar : Peraturan KASN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: Angka 0,2 - 1</p> <p>Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BKPPD dan KASN</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatkan kualitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Pengukuran Indkes Profesionalitas ASN mengacu pada Perka BKN Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Satuan : Angka 0-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: BKPPD dan BKN</p>

23. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- URUSAN : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
- TUGAS : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan pelayanan di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset;
8. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Opini BPK	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Opini BPK “WTP” merupakan indikator pengelolaan keuangan dan aset pada Pemerintah daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai 3 : untuk Opini WTP; - Nilai 2 : untuk Opini WDP; - Nilai 1 : untuk Opini Disclaimer

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka 1-3 dan katagori</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPPKAD dan BPK</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	<p>Alasan Pemilihan Indikator: PAD merupakan pendapatan daerah yang masih terus dapat digali dan ditingkatkan sebagai sumber utama pendapatan daerah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $((PAD_{th-n} - PAD_{th-n-1}) / PAD_{th-n-1}) \times 100$persen</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPPKAD</p>
1.2	Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Tahapan penyusunan Raperda APBD dan Perda APBD tepat waktu sebagai tolak ukur pengesahan Perda APBD untuk pedoman/ regulasi pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Magelang</p> <p>Formulasi Pengukuran: $(\text{Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu} / \text{jumlah APBD}) \times 100$ persen</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPPKAD</p>
1.3	Meningkatnya pengelolaan Aset Daerah	Persentase kejelasan status aset daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Kejelasan status aset daerah sebagai: 1. Tolak ukur WTP dan 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Formulasi Pengukuran: $(\text{Jumlah Aset yang jelas statusnya} / \text{Jumlah aset seluruhnya}) \times 100$ persen</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: BPPKAD</p>

24. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- URUSAN : Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
- TUGAS : Membantu Bupati Magelang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, serta bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- FUNGSI :
 1. Perumusan kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, serta kesekretariatan.
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 4. Pembinaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 5. Pelaksanaan administrasi urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penelitian dan pengembangan, urusan perencanaan pengendalian, dan evaluasi, perencanaan bidang tata ruang, pengembangan wilayah, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial, dan budaya.
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemenrintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal, yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Non Kumulatif</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan 12/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Satuan: Angka 1-100 dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Daerah</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian dan keterukuran kinerja program perencanaan pembangunan daerah	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase ketercapaian dan keterukuran kinerja program perencanaan pembangunan daerah merupakan gambaran kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan kinerja pembangunan daerah menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Tingkat ketercapaian dan keterukuran kinerja pembangunan daerah ini juga didukung ketersediaan dan konsistensi dokumen perencanaan. Konsistensi dokumen perencanaan ditandai dengan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD. Indikator ini mewakili kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbangda di bidang perencanaan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang berpredikat sangat tinggi ($\geq 91\%$) dan tinggi ($76\% \leq 90\%$)/Jumlah indikator kinerja program)x100%) + (Jumlah program pada RKPD tahun berkenaan/Jumlah program pada RPJMD tahun berkenaan x 100%)/2</p> <p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bappeda dan Litbangda</p>
1.2	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan dari jumlah kajian kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Hal ini didasarkan pada upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung penguatan penelitian dan pengembangan kajian kebijakan daerah (<i>planning by research</i>). Indikator ini juga terdapat dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah kajian kelitbangan dalam RKPD/jumlah kajian kelitbangan dalam RPJMD) x 100%</p> <p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Bappeda dan Litbangda</p>

25. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- URUSAN : Ketentraman
- TUGAS : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- FUNGSI : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penilaian IKD meliputi prioritas: a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;</p> <p>f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan</p> <p>g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.</p> <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan penegakan hukum+Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p>
Sasaran:			
1.1	Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana merupakan salah satu kunci keberhasilan mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana</p> <p>Formulasi Pengukuran: (((Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana/jumlah penduduk di kawasan rawan bencana) x 100%)) + ((Jumlah desa tangguh bencana/jumlah desa rawan bencana) x 100%)) + ((jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan / jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap bencana) x 100%)) + ((Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan rehabilitasi dan rekontruksi/jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi) x 100%)))/4</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>

26. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penilaian IKD meliputi prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. <p>Formulasi Pengukuran: (Cakupan penegakan hukum+Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3</p> <p>Satuan: Angka (1-100)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat sebagai salah satu indikator stabilitas keamanan di suatu wilayah.</p> <p>Formulasi Pengukuran: $\frac{((\text{Jml ormas, LSM dan OKP yg aktif tahun } n - \text{Jml ormas, LSM dan OKP yg aktif tahun } n-1) / \text{Jml ormas, LSM dan OKP yg tercatat tahun } n-1) + (\text{Jml konflik sosial tertangani tahun } n - \text{Jml konflik sosial tertangani tahun } n-1) / \text{Jml konflik sosial tahun } n) + (\text{Jumlah kegiatan pembinaan politik tahun } n - \text{Jumlah kegiatan pembinaan politik tahun } n-1) / \text{Jumlah kegiatan tahun } n-1)}{3} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan: Komulatif</p> <p>Sumber Data: Kantor Kesbangpol</p>

27. INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

- URUSAN : Wajib Pelayanan Dasar
- TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Angka Harapan Hidup	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</p> <p>Formulasi Pengukuran: Nilai Angka Harapan Hidup dinilai berdasarkan Angka Perkiraan lama Hidup rata-rata Penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur (BPS).</p> <p>Satuan: Angka 0-100</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Dinas Kesehatan</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Akreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Badan Independen (Komisi Akreditasi Rumah Sakit/KARS) pada rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien</p> <p>Formulasi Pengukuran: Sesuai Hasil Penilaian KARS pada waktu Survei Akreditasi.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka / Katagori: 1. Pratama (Bintang 1) 2. Dasar (Bintang 2) 3. Madya (Bintang 3) 4. Utama (Bintang 4) 5. Paripurna (Bintang 5)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: RSUD Muntilan</p>

28. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SALAMAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100)dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salaman</p>

29. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BOROBUDUR

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Borobudur</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Borobudur</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Borobudur</p>

30. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGLUWAR

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngluwar</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngluwar</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngluwar</p>

31. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SALAM

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salam</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salam</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Salam</p>

32. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SRUMBUNG

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Srumbung</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Srumbung</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Srumbung</p>

33. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DUKUN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Dukun</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Dukun</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Dukun</p>

34. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAWANGAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Sawangan</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Sawangan</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Sawangan</p>

35. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUNTILAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Muntilan</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Muntilan</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Muntilan</p>

36. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUNGKID

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mungkid</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mungkid</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mungkid</p>

37. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MERTOYUDAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Mertoyudan</p>

38. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEMPURAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tempuran</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tempuran</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tempuran</p>

39. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KAJORAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kajoran</p>

40. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALIANGKRIK

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>

41. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANDONGAN

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100)dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Bandongan</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Bandongan</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Bandongan</p>

42. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CANDIMULYO

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Candimulyo</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Candimulyo</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Candimulyo</p>

43. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAKIS

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Pakis</p>

44. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NGABLAK

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngablak</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngablak</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Ngablak</p>

45. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GRABAG

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Grabag</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Grabag</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Grabag</p>

46. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TEGALREJO

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100)dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Tegalrejo</p>

47. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SECANG

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Secang</p>

48. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN WINDUSARI

- URUSAN : Pemerintahan fungsi penunjang
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Satuan: Angka (0-100) dan huruf</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: Angka 1-100</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>
1.2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)x100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)x100%))/2</p> <p>Satuan: % (persen)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Windusari</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN